MAKNA KEDEWASAAN DALAM PERKAWINAN

M. Ghufron

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.
E-mail. Ghufron4uyahoo.com

Abstract: *In a marriage, the bridegroom's maturity is one of the considerations of many parties especially for the state official. Maturity should be owned by each spouse since it is deemed necessary to determine the happiness of the family. However, in term of law itself provides many different provisions concerning with the minimum age of consent, it has no mutual understanding about the agreed boundary between one law and another. Because of that, this paper further examines the meaning of maturity according to law and custom. The study is carried out to find the meaning of maturity in a marriage that is expected to contribute to the policy makers of law. Because of that, the author uses a juridical, philosophical, and sociological perspective in viewing the meaning of maturity in a marriage. Legally, a person can perform the marriage if his/her age has already reached the limit prescribed by law. In sociological sense, the bridegroom is supposed to understand the social responsibility. It can surely lead the family to the goodness and responsibility to community at large in maintaining peace through household. While the philosophical aspect of maturity hopes that the bridegroom is quite ready to face the challenge. In addition, it is expected that the emerging wisdom of the maturity can help to illuminate and make everything in their life as a lesson for the next action.*

Abstrak: Dalam suatu perkawinan, kedewasaan para mempelai menjadi salah satu pertimbangan banyak pihak, terutama penyelenggara negara. Kedewasaan pasangan dipandang perlu dimiliki setiap pasangan yang hendak menikah karena nantinya akan menentukan kebahagiaan rumah tangga. Namun, dari sisi undang-undang sendiri, banyak memberikan ketentuan yang berbeda-beda tentang batas usia dewasa, tidak ada kesepakatan batasan antara undang-undang yang satu dengan yang lain. Untuk itu, tulisan ini mengkaji lebih jauh makna kedewasaan itu dengan melihat makna kedewasaan menurut undang-undang dan adat masyarakat. Telaah ini dilakukan untuk menemukan makna kedewasaan dalam perkawinan sehingga diharapkan dapat memberi sumbangan kepada pembuat kebijakan perundang-undangan. Karena itu, penulis menggunakan perspektif yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam melihat makna kedewasaan dalam perkawinan. Secara yuridis, Seseorang dapat melaksanakan perkawinan apabila usianya telah mencapai batas-batas yang telah ditentukan oleh undang-undang perkawinan. Kedewasaan dalam arti sosiologis menghendaki agar mempelai paham seutuhnya tanggung jawab sosial. Tentunya dapat membimbing keluarga pada kebaikan dan bertanggung jawab terhadap masyarakat secara luas dalam

AL-HUKAMA

The Indonesian Journal of Islamic Family Law
Volume 06, Nomor 02, Desember 2016; ISSN:2089-7480

memelihara ketentraman melalui rumah tangga. Sedangkan kedewasaan dalam aspek filosofis mengharapkan agar para mempelai menjadi pribadi yang utuh dalam menghadapi tantangan hidup dalam rumah tangga, baik yang bersifat semu maupun nyata. Selain itu, diharapkan pula kebijaksanaan yang muncul dari kedewasaan tersebut dapat membantu menerangi dan menjadikan segala hal dalam hidup sebagai pelajaran bagi setiap tindakan yang akan dilakukan selanjutnya.

Kata kunci: kedewasaan, yuridis, filosofis, dan sosiologis

Pendahuluan

Perkawinan adalah kontrak suci dan merupakan tiang utama dalam membentuk keluarga bahagia. Karena teramat penting dan sucinya ikatan ini, Islam menentukan sejumlah aturan dan tindakan yang akan mengokohkan ikatan rumah tangga. Sebagian aturan dan tindakan itu wajib dilaksanakan, bahkan sebelum ikatan dimulai (pra-nikah). Sementara sebagian yang lain, mesti dijaga setelah akad nikah dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan jalan bagi pasangan suami-isteri untuk membina rumah tangga.¹

Mewujudkan rumah tangga yang baik menjadi cita-cita setiap pasangan yang menikah. Apakah kita akan dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia? Pertanyaan ini sudah pasti menjadi pertanyaan pra-perkawinan mereka. Perkawinan bukan persoalan mudah, tidak semua pasangan dapat sukses mengarunginya. Untuk itu, diperlukan persiapan-persiapan tertentu agar keguncangan bahtera rumah tangga dapat diminimalisir, perlu ada rencana matang agar semua yang terkait perkawinan dapat berjalan dengan baik.²

Orang yang telah dewasa, fisik dan mental, belum tentu dapat membina dan mendirikan rumah tangga secara sempurna, apa lagi orang yang belum dewasa. Secara rasional dapat disimpulkan, bahwa kedewasaan merupakan persoalan yang amat penting dalam perkawinan serta berpengaruh besar terhadap keberhasilan berumah tangga.

Fikih munakahat tidak menjadikan kedewasaan calon pengantin sebagai syarat sah. Artinya, suatu perkawinan sah

¹Chuzaimah T. Yanggo, *Problematisa Hukum Islam Kontemporer*, (Pustaka Firdaus t.t), 67.

²Ibid., 66

meskipun calon suami-isteri itu belum dewasa. Tidak adanya syarat usia dewasa itu merupakan kemudahan yang diberikan oleh ulama, karena ada segi-segi positif yang ingin dituju.³

Uraian-uraian terdahulu telah memperlihatkan, bahwa faktor kedewasaan merupakan kondisi yang amat penting, kendati menurut fikih munakahat tidak termasuk syarat perkawinan. Namun jika diteliti dengan seksama, baik al-Quran maupun Hadis, tidak pernah memberikan batasan secara definitif berapa usia orang yang dapat dianggap dewasa. Selain itu, berdasarkan ilmu pengetahuan, setiap daerah dan zaman memiliki perbedaan kondisi dengan daerah dan zaman yang lainnya yang sangat berpengaruh terhadap cepat lambatnya kedewasaan seseorang.⁴

Literatur lain juga menyebutkan, bahwa perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satunya atau keduanya berumur masih muda dalam pandangan kekinian.⁵ Dengan kata lain, perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang menurut hukum positif masih belum cukup untuk melaksanakan perkawinan.

Perdebatan tentang perkawinan di bawah umur, dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia, mengemuka karena adanya pembatasan oleh hukum positif. Kebanyakan pakar hukum Islam kontemporer memiliki pandangan yang cenderung membolehkan pernikahan di bawah umur. Mereka menyandarkan pandangannya pada hasil upaya interpretasi terhadap beberapa ayat al-Quran dan apa yang dilakukan oleh Nabi.⁶

Beberapa negara, termasuk Indonesia, belakangan ini melihat, bahwa penetapan usia minimal nikah harus dilakukan. Negara mengambil kebijakan ini dengan pertimbangan bahwa perkawinan tidak akan memberikan kemaslahatan jika dilakukan pada saat para mempelai belum matang. Untuk itu, negara mulai memberlakukan ketentuan ini.

³Asep Saepuddin Jahar dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis; Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kencana. 2013), 43.

⁴Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika*, 65.

⁵Asep Saepuddin Jahar dkk, *Hukum Keluarga....*, 43.

⁶Ibid, 65-66.

Di Indonesia, setelah ada peraturan baru tentang perkawinan, di samping harus mendaftarkan perkawinan yang akan dilakukan, negara juga campur tangan dalam hal pengaturan usia para mempelai laki-laki ataupun perempuan. Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan tidak dapat dilaksanakan jika kedua mempelai atau salah satu dari keduanya belum mencapai batas umur yang telah ditentukan, yakni 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Laki-laki dan perempuan yang memaksa melaksanakan perkawinan sebelum umur tersebut harus mendapat izin dari pengadilan. Selain itu, pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 7 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menetapkan, bahwa perempuan dan laki-laki yang memaksa melaksanakan perkawinan setelah umur puber, tetapi belum berumur 21 tahun, maka harus memperoleh izin ayahnya secara tertulis.⁷

Aturan tersebut telah diketahui oleh para pihak terkait, yakni pegawai pencatat nikah dan para hakim. Namun karena sejumlah alasan, terkadang mereka mengabaikan dengan memberi izin terhadap mereka yang masih di bawah umur untuk melaksanakan perkawinan, yakni melalui aturan dispensasi.

Hampir dalam setiap bidang kehidupan, kedewasaan selalu menjadi ukuran tanggung jawab dari sebuah perbuatan karena hanya seseorang yang telah dewasa saja yang perbuatannya dianggap dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa ketentuan hukum yang memberikan kualifikasi pada perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang telah dewasa. Misalnya ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah jika subjek hukumnya cakap bertindak. Pengertian cakap bertindak, berhubungan erat dengan makna kedewasaan, karena menurut Pasal 1330 angka 1 KUHPerdara, orang yang tidak cakap bertindak itu salah satunya adalah mereka yang belum dewasa/ *minderjarigen*.⁸

⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, t.t), 76-77.

⁸Ibid., 77

Dalam membahas tentang kedewasaan, kita tidak bisa membatasi diri dengan satu atau dua bidang keilmuan saja, namun kita harus melakukan pengkajian-pengkajian secara interdisipliner, karena istilah kedewasaan sendiri dipergunakan oleh hampir semua bidang ilmu sosial, sebutlah diantaranya: ilmu sosiologi, ilmu hukum, ilmu politik, ilmu ekonomi, bahkan dalam ilmu agama pun persoalan kedewasaan menjadi hal yang prinsip dan menentukan. Dalam lapangan ilmu hukum, kedewasaan dapat menentukan keabsahan dari suatu perbuatan hukum. Seseorang yang belum dewasa, dipandang sebagai subjek yang belum mampu bertindak sendiri dihadapan hukum, sehingga tindakan hukumnya harus diwakili oleh orang tua/walinya.

Keanekaragaman pendapat dalam menentukan batas usia dewasa disebabkan oleh tidak adanya patokan yang dapat digunakan secara akurat untuk menentukan batas kedewasaan manusia. Usia dan perkawinan memang bisa menjadi salah satu penentu kedewasaan, namun tidak selalu menjadi ukuran yang tepat, karena kedewasaan sendiri merupakan suatu keadaan di mana seseorang telah mencapai tingkat kematangan dalam berfikir dan bertindak, sedangkan tingkat kematangan itu hadir pada masing-masing orang secara berbeda-beda, bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa mungkin saja sampai dengan akhir hayatnya manusia tidak pernah mengalami kedewasaan, karena kedewasaan tidak selalu berbanding lurus dengan usia.⁹

Memang tidak semua peraturan perundang-undangan menyebutkan secara tegas tentang batas kedewasaan, namun dengan menentukan batasan umur bagi suatu perbuatan hukum tertentu, maka sesungguhnya faktor kedewasaanlah yang sedang menjadi ukuran, misalnya dalam beberapa undang-undang hanya mencantumkan batasan umur bagi mereka yang disebut anak, sehingga di atas batas umur tersebut harus dianggap telah dewasa, atau undang-undang membolehkan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu setelah melampaui batas umur yang

⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 59.

ditentukan, semua pengaturan tersebut pada akhirnya tertuju pada maksud dan pengertian tentang kedewasaan.¹⁰

Tulisan ini bermaksud mengkaji makna kedewasaan dalam perkawinan dengan melihat ketentuan tentang batasan usia nikah dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Ketentuan tersebut akan dilihat dari perspektif, yuridis, filosofis dan sosiologis.

Kedewasaan Secara Yuridis

Penentuan batas usia kedewasaan dalam beberapa undang-undang memang terkesan semrawut, karena antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain sama sekali tidak mengandung korelasi, padahal jika ditarik benang merah dari setiap tujuan penentuan batas usia kedewasaan, maka pada akhirnya akan menunjuk pada pengertian tanggung jawab, yaitu untuk menjamin bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Beberapa ketentuan undang-undang tentang batas usia kedewasaan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 50 Ayat (1) menyebutkan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali" sedangkan mengenai batas kedewasaan untuk melangsungkan perkawinan ditentukan dalam Pasal 6 Ayat (2) menyebutkan "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua." Pasal 7 Ayat (1) "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun".¹¹
2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 98 Ayat (1) menyebutkan bahwa

¹⁰Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Rnika Cipta, 1991).163.

¹¹Undang-Undang Perkawinan, Cet. 1(Bandung: Fokusmedia), 30.

- ”Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.¹²
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Pdt) Pasal 330 Ayat (1) menyebutkan ”Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dulu telah kawin” sedangkan pada Ayat (2) disebutkan bahwa ”Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa”.¹³
 4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 171 menyebutkan ”Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah: a. anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali Pasal 153 Ayat (5) menyebutkan ”Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang”.
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa ”Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.¹⁴
 6. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45 menyebutkan ”Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan

¹²*Kompilasi Hukum Islam*, 148.

¹³Subekti. R. dan Tjitrosudibio. R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. Ke-31, (Pradnya Paramita: Jakarta, 2001)

¹⁴Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2.

pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah”.¹⁵

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 39 Ayat (1) menyebutkan bahwa: “Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: a) paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan b) cakap dalam melakukan perbuatan hukum”.¹⁶
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 menyebutkan ”Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin” Pasal 4 Ayat (2) ”Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak”.¹⁷
9. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (18 tahun atau sudah menikah). Dalam undang-undang ini tidak secara gamblang dikatakan bahwa anak yang telah berusia 18 tahun atau sudah menikah disebut sebagai orang dewasa, namun beberapa pasal dalam undang-undang ini menyiratkan hal tersebut. Hal ini terlihat dari pasal 4c, 4d, 4h dan 4l. Di mana seorang anak yang berasal dari perkawinan campuran, baik anak dari perkawinan sah maupun perkawinan yang tidak sah, hingga usia 18 tahun mendapatkan kewarganegaraan ganda. Hal ini

¹⁵Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 3.

¹⁶Tan Thong Kie, *Buku I Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT Iktiar Van Hoeve), 2000.

¹⁷Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak., 1.

berarti bahwa seorang anak yang belum berusia 18 tahun masih berada dalam pengawasan orang tuanya, oleh karena itu dia belum dapat menentukan kewarganegaraannya.¹⁸

Setelah berusia 18 tahun dia dianggap mampu untuk menentukan kewarganegaraannya, hal ini terlihat dalam pasal 6. Meski tidak diterangkan secara gamblang, namun hal ini berarti bahwa seorang anak yang telah berusia 18 tahun atau telah menikah dianggap telah dewasa sehingga dia dapat menentukan sendiri kewarganegaraannya. Selain itu, umur 18 tahun pun menjadi patokan bagi seorang warga negara asing untuk mengajukan permohonan menjadi warga negara Indonesia, tidak mungkin seseorang yang masih dianggap di bawah umur diperkenankan mengajukan permohonan perubahan kewarganegaraan. Oleh karena itu sangat jelas sekali bahwa undang-undang kewarganegaraan menetapkan dewasa tidaknya seseorang dilihat dari umurnya yang telah mencapai 18 tahun atau sudah menikah.¹⁹

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan Pasal 63 Ayat (1) menyebutkan "Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP"²⁰
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 81 Ayat (2) menyebutkan syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut: a. usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D; b. usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan c. usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.²¹

¹⁸Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, 3.

¹⁹Ibid.

²⁰Subekti. R. dan Tjitrosudibio. R, *Kitab Undang – Undang....*, 90.

²¹Kompilasi perundang-undangan tentang KPK, POLISI, dan Jaksa, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 61.

12. UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Pasal 13 menyebutkan "Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih".²²

Dari beberapa definisi dewasa menurut berbagai pandangan undang-undang di atas, penulis perlu memfokuskan pembahasan pada makna kedewasaan hanya dalam masalah perkawinan agar terarah pada disiplin ilmu Ahwal Syahsiyah. Maka dari itu, penulis memilih judul "Makna Kedewasaan dalam Perkawinan" (Analisis Yuridis, Filosofis dan Sosiologis Tentang Pembatasan Usia Perkawinan dalam UU Tahun 1974)".

Masalah kedewasaan akhir-akhir ini muncul setelah berlakunya Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena undang-undang ini ternyata tidak mengatur bidang perkawinan saja, tetapi lebih menyerupai pengaturan dasar hukum keluarga. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 memberi batasan tentang usia dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) serta pada Pasal 50.²³

Banyak pihak yang keberatan dengan batas usia 18 (delapan belas) tahun ini karena menganggap bahwa usia ini seorang anak terlalu muda untuk diberi dan diminta tanggung jawab secara hukum atas perbuatan hukum yang mereka lakukan. Sekali lagi ini adalah pandangan masyarakat kota, yang jumlahnya relatif lebih kecil daripada masyarakat desa. Kalau kita bandingkan pandangan masyarakat kota dengan masyarakat desa yang menganggap anak usia 14 atau 16 tahun telah dewasa, maka perbedaan pendapat ini perlu kita kaji lebih jauh secara yuridis. Kalau kita berpatokan pada pandangan masyarakat desa tersebut, maka batasan usia 18 (delapan belas) tahun itu adalah suatu perkembangan di mana batas usia dewasa seorang anak sudah ditentukan lebih tinggi daripada ukuran pandangan di desa.

²²Subekti. R. dan Tjitrosudibio. R, *Kitab Undang-Undang....*, 90.

²³Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty 1988), 136-159.

Prof. Subekti menyebutkan bahwa batasan usia 18 tahun tersebut dapat dipandang sebagai suatu jalan tengah antara batas usia dalam alam pikiran masyarakat desa dan kota.²⁴

Perbedaan pendapat di antara para ahli hukum tentang batas usia dewasa, disebabkan berbagai peraturan yang menyebut suatu batas usia untuk hal tertentu, selain juga karena dipertajam oleh perbedaan pandangan dan penafsiran. Karena itu, perlu ditelaah secara mendalam sebetulnya peraturan mana yang dapat atau lebih tepat untuk dijadikan pegangan secara yuridis dalam menentukan kedewasaan. Perlu pula dikaji apa yang akan dijadikan patokan dalam menentukan bahwa suatu peraturan itu betul-betul merupakan dasar hukum bagi terlaksananya perbuatan hukum tertentu.²⁵

Kedewasaan secara yuridis selalu mengandung pengertian tentang adanya kewenangan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa adanya bantuan pihak lain, baik orang tua atau walinya.²⁶ Jadi seseorang adalah dewasa apabila orang itu diakui oleh hukum untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, dengan tanggung jawab sendiri atas apa yang ia lakukan. Di sini, terdapat kewenangan seseorang untuk secara mandiri melakukan suatu perbuatan hukum.

Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menimbulkan suasana baru dalam hukum keluarga Indonesia. Karena undang-undang tersebut tidak hanya mengatur tentang bidang perkawinan saja, tetapi juga bidang lain yang termasuk bidang Hukum Keluarga, seperti status anak, kedewasaan, tanggung jawab orang tua terhadap anak, dan anak terhadap orang tua, serta tentang perwalian anak. Meskipun pengaturan tentang Hukum Keluarga dalam Undang-undang Perkawinan hanya garis besarnya saja dan masih memerlukan peraturan pelaksana yang akan mengaturnya lebih lanjut, tetapi dapatlah dikatakan bahwa undang-undang tersebut telah mengatur

²⁴Ibid.

²⁵Waite, L.J. & Gallagher, M., 2003, *Selamat Menempuh Hidup Baru: Manfaat Perkawinan dari Segi Kesehatan, Psikologi, Seksual, dan Keuangan*, Penerjemah: Eva Yulia Nukman, Mizan Media Utama, Bandung

²⁶Ibid.

dasar-dasar Hukum Keluarga nasional, terutama berkaitan dengan kedewasaan secara yuridis, sosial dan juga tentunya ranah filosofisnya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga mengatur tentang kedewasaan, yaitu pada Pasal 47 (1) (2) dan Pasal 50. Sebagaimana KUHPerdata/BW mengatur batas usia dewasa dalam bab tentang Hukum Keluarga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juga telah menentukan batas usia dewasa tersebut.

Pasal 47 menegaskan bahwa :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 50 menegaskan bahwa :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali.
- (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.²⁷

Setelah kita baca dan simak isi pasal di atas, dapat kita simpulkan bahwa setiap perbuatan hukum yang dilakukan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun tanpa diwakili orang tua atau walinya, dapat dibatalkan. Di sini dengan jelas dan tegas diatur tentang perbuatan hukum seorang anak belum dewasa. Jadi Pasal 47 (1), (2) dan 50 (1) (2), Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur tentang perbuatan hukum seseorang anak belum dewasa, karena ia dalam setiap perbuatan hukumnya tidak dapat melakukan sendiri, melainkan harus selalu diwakili oleh orang tua maupun walinya.²⁸

Dari penjelasan singkat tentang makna dewasa secara yuridis di atas, dapat diambil satu garis besar, bahwa seseorang dapat

²⁷Undang-Undang Perkawinan, Cet. 1 (Bandung: Fokusmedia), 30.

²⁸Djuhaedah Hasan, 'Masalah Kedewasaan, 6-7

dianggap dewasa menurut hukum (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) apabila memenuhi kriteria yang ada dan jelas dalam undang-undang tersebut. Kriteria tersebut ditetapkan agar setiap subyek hukum dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan yang dilakukannya. Dalam hal perkawinan ia diharapkan mampu memenuhi persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan.

Dewasa Secara Sosiologis

Mempertimbangkan realitas masyarakat Indonesia yang hidup dengan watak yang religius, maka untuk tetap menjaga sakralitas perkawinan, pertimbangan-pertimbangan hukum yang berasal dari ajaran agama patut digunakan dalam memberlakukan ketentuan usia perkawinan sebagaimana yang telah termaktub dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974. Pemikiran yang mendasari pertimbangan ini adalah teori hukum yang dirumuskan oleh aliran *Sociological Jurisprudence* yang memberikan perhatian sama pentingnya kepada faktor-faktor penciptaan dan pemberlakuan hukum, yaitu masyarakat dan hukum.

Pada umumnya, masyarakat adat memandang seseorang dewasa jika telah mampu memelihara kepentingannya sendiri. Definisi ini dikemukakan oleh beberapa pakar hukum adat, antara lain: Ter Haar, dewasa adalah cakap (*volwassen*), sudah kawin dan hidup terpisah meninggalkan orang tuanya; Soepomo, dewasa adalah *kuwat gave*, cakap mengurus harta keperluannya sendiri; Djodigono, dewasa adalah secara lahir, *mentas, kuwat gave, mencar*.²⁹

Wayan P. Windia, ahli hukum adat Bali dari Fakultas Hukum Unud menyatakan, bahwa pada hukum adat Bali, jika seseorang telah mampu *negen* (*nyuun*) sesuai beban yang diujikan, mereka dinyatakan *loba* sebagai orang dewasa. Misalnya, ada warga yang mampu *negen* kelapa delapan butir atau *nyuun* kelapa enam butir, ia otomatis dinyatakan sudah memasuki golongan orang dewasa.³⁰

²⁹Dede Saban Sungkuwula, 'Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Usia Dini (Penelitian di Desa Kontumere Kec. Kabawo Kab. Muna)', (Skripsi--fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo, 2009),13.

³⁰Jusuf, *Sudut Pandang Sosiologi Fungsi Keluarga*, (Surabaya: PT. Sinar Sejahtera, 2004), 39.

Kedewasaan menurut pandangan adat memang terlepas dari patokan umur sehingga tidak ada keseragaman. Mengenai kapan seseorang dapat dikatakan telah dewasa, ukurannya tergantung kepada masing-masing individu, walaupun sebenarnya tetap memiliki pertautan dengan pengertian dewasa menurut Ilmu Psikologi. Ilmu Psikologi memandang kedewasaan sebagai suatu fase pada kehidupan manusia yang menggambarkan telah tercapainya keseimbangan mental dan pola pikir dalam setiap perkataan dan perbuatan. Seseorang yang telah mampu bekerja (*kumat gave*) untuk mencari penghidupan, maka sesungguhnya secara pribadi dia telah mampu berfikir dan bertanggung jawab atas kebutuhan hidupnya, walaupun proses pendewasaan dini dalam masyarakat tidak termasuk pada katagori tersebut.³¹

Menurut Harsanto Nursadi, kedewasaan dalam konsep adat didasarkan pada:

1. Penilaian masyarakat
2. Kemampuan berburu dan mencari makan
3. Kemampuan memimpin teman-temannya
4. Melihat kondisi fisik seseorang³²

Berdasar pemaparan tersebut, baik pertimbangan yang dikemukakan maupun aspek adat yang juga sangat mungkin mempengaruhi adanya Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) terutama dalam hal batas usia perkawinan, memang tidak ada ketentuan khusus yang definitif terkait kedewasaan dalam usia perkawinan. Meskipun demikian, dengan adanya batasan usia dalam melaksanakan perkawinan, secara sosial, maksud pembatasan usia tersebut agar para pihak/ atau mempelai memahami seutuhnya tanggung jawab sosial, yaitu kemampuan membimbing keluarga pada kebaikan dan tanggung jawab terhadap masyarakat secara luas dengan memelihara ketentraman melalui rumah tangga.

³¹Sugiyem, 'Penerapan Pendewasaan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris dalam Pembuatan Akta Kuasa Menjual Hak Atas Tanah di Samarinda', (Tesis--Universitas Dipenegoro, Samarinda, 2010),15.

³²Ibid, 15.

Kedewasaan dilihat dari Aspek Filosofis

Berpikir dewasa merupakan substansi dari filsafat kehidupan, karena orang yang dewasa adalah orang yang dapat mengambil hikmah dari setiap masalah dalam hidupnya. Berpikir dewasa berarti berfikir rasional. Rasionalitas sendiri adalah sinkronisasi antara akal dan realitas. Artinya, orang yang dewasa akan menerima sesuatu atau mengeluarkan sesuatu bukan hanya karena sesuatu itu masuk akal, tetapi juga sesuai dengan kenyataan, tidak bertolak belakang antara teori dengan realitas, ucapan dan tindakan selaras sehingga tidak membingungkan dan dapat diterima sebagai suatu kebenaran, bukan suatu bentuk kesalahan yang menyesatkan, sehingga ucapan-ucapannya tidak menipu dan selalu membawa kebaikan bagi orang banyak”.³³ Orang pun akan mudah mengerti setiap ucapan dan nasihatnya, karena seseorang yang menggunakan rasionalitas, tidak hanya bicara, tetapi juga mempraktekkan dalam kehidupan.

Kedewasaan berpikir terfokus pada pembentukan pola pikir dewasa. Pola pikir dewasa terdiri dari beberapa point penting, di antaranya adalah subjektivitas. Subjektivitas merupakan suatu bentuk kesalahan dalam pendewasaan berpikir. Pengertian subjektivitas sendiri adalah menyimpulkan suatu kebenaran nyata hanya dari satu sisi saja. Kesalahan subjektivitas bukan pada substansi masalahnya, tapi pada sudut pandang melihat masalah tersebut, sehingga informasi yang didapatkan dan dikeluarkan hanya terbatas pada satu sisi tertentu.³⁴

Maka dari itu, pandangan subjektivitas saja tidak cukup adil untuk menampakkan kebenaran yang bersifat dewasa, tetapi perlu juga pandangan-pandangan yang lainnya, yaitu pandangan objektivitas. Objektivitas merupakan pandangan yang tidak cukup melihat dari satu sudut saja, tetapi harus dari berbagai sudut agar kebenaran yang ada tersebut betul-betul dapat dijamah sehingga dapat menyelesaikan permasalahan.

³³Yvonne Sherratt, *Adorno's Positive Dialectic*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), 71.

³⁴Ibid., 75.

Membahas kedewasaan dalam perkawinan melalui aspek filosofis, tidak lain agar para mempelai dapat menjadi pribadi yang utuh dalam menghadapi tantangan hidup dalam rumah-tangga, baik yang semu maupun nyata.³⁵ Selain itu, kebijaksanaan yang muncul dari kedewasaan diharapkan dapat membantu menerangi dan menjadikan segala hal dalam hidup sebagai pelajaran bagi setiap tindakan yang akan dilakukan selanjutnya.

Dalam hal perkawinan, semua orang mengetahui bagaimana seharusnya ikatan itu diciptakan dan dipelihara. Oleh karena itu, cara berfikir dan bertindak, menjadi tolok ukur utama bagaimana seseorang akan melalui dan membawa rumah tangganya ke arah yang baik dan penuh dengan kebahagiaan. Dalam menyelesaikan problem kehidupan, terlebih dalam rumah-tangga, dibutuhkan tidak hanya dengan materi saja, tetapi juga kedewasaan dalam bersikap dan menindaklanjuti permasalahan yang ada hingga kebaikan menghampiri.

Penutup

Dari paparan menggunakan tiga perspektif di atas, dapat disimpulkan bahwa, kedewasaan secara yuridis tetap ada meskipun Undang-Undang Perkawinan tidak menjelaskannya secara definitif. Seseorang dapat melaksanakan perkawinan apabila usianya telah mencapai batas-batas yang telah ditentukan oleh undang-undang perkawinan. Segala tindakan yang dilakukan oleh pihak mempelai akan dipertanggungjawabkan di depan hukum.

Kedewasaan dalam arti sosiologis menghendaki agar mempelai paham seutuhnya terkait tanggung jawab sosial. Tentunya dapat membimbing keluarga pada kebaikan, bertanggung jawab terhadap masyarakat secara luas dalam memelihara ketentraman melalui rumah tangga.

Sedangkan kedewasaan dalam aspek filosofis mengharapkan agar para mempelai menjadi pribadi yang utuh dalam menghadapi tantangan hidup dalam rumah tangga, baik yang bersifat semu maupun nyata. Selain itu, diharapkan pula kebijaksanaan yang muncul dari kedewasaan tersebut dapat membantu menerangi dan

³⁵Ibid., 90.

menjadikan segala hal dalam hidup sebagai pelajaran bagi setiap tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Oleh karena itu, cara berfikir dan bertindak menjadi tolok ukur utama bagaimana seseorang akan melalui dan membawa rumah tanganya ke arah yang baik, sehingga tidak cukup hanya dengan materi saja dalam menyelesaikan problem kehidupan, terlebih dalam rumah tangga, tetapi juga kedewasaan dalam bersikap dan menindak lanjuti permasalahan untuk diselesaikan.

Dengan demikian, maka perlu adanya rekonstruksi terkait Undang-Undang Perkawinan, khususnya tentang kedewasaan dalam perkawinan. Rekonstruksi tersebut dapat dilakukan dengan mengkaji berbagai sudut pandang sehingga dapat membangkitkan sinergi hukum yang relevan dengan undang-undang lainnya serta realitas masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, t.h.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Andi Sjamsu Alam, 'Usia Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Kontribusinya Bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia', dalam *Jurnal....*
- Asep Saepuddin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis; Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana. 2013)
- Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Firdaus t.h.
- Dede Saban Sungkuwula, 'Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Usia Dini (Penelitian di Desa Kontumere Kec. Kabawo Kab. Muna)', Skripsi--fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo, 2009.
- Jusuf, *Sudut Pandang Sosiologi Fungsi Keluarga*, Surabaya: PT. Sinar Sejahtera, 2004.
- Subekti R. dan Tjitrosudibio R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 31, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet. 1, Jakarta: PT. Rénika Cipta, 1991.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Sugiyem, 'Penerapan Pendewasaan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris dalam Pembuatan Akta Kuasa Menjual Hak Atas Tanah di Samarinda', Tesis--Universitas Dipenegoro, Samarinda, 2010.
- Tan Thong Kie, *Buku I Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: PT Iktiar Van Hoeve, 2000.
- Waite, L.J. & Gallagher, M. *Selamat Menempub Hidup Baru: Manfaat Perkawinan dari Segi Kesehatan, Psikologi, Seksual, dan Keuangan*, Penerjemah: Eva Yulia Nukman, Bandung: Mizan Media Utama, 2003.
- Yvonne Sherratt. *Adorno's Positive Dialectic*, Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
- Kompilasi Perundang-Undangan Tentang KPK, POLISI, dan Jaksa, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Perkawinan dan KHI, Cet. 1, Bandung: Fokusmedia, t.t.